GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 11 Desember 2007**
Subyek	**: Hutan Bakau**	**Hari**	**: Selasa**
		Halaman	**: 15**

64.749 Ha Hutan Bakau di Pantai Jambi Punah

[JAMBI] Sedikitnya 64.749 hektare (ha) hutan bakau di pantai timur Provinsi Jambi sudah punah. Luas hutan bakau yang tersisa hanya sekitar 251 ha atau sekitar 6,2 persen. Sisa hutan bakau tersebut kini terancam rusak akibat tingginya eksploitasi hutan bakau dan daerah pesisir pantai.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Jambi, H Zabur Rustam pada Sosialisasi dan Pameran Hasil Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jambi di Jambi, Senin (10/12).

Kerusakan hutan bakau di pantai timur Jambi yang meliputi wilayah Kabupaten Tanjabbar dan Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) disebabkan penebangan bakau. Hutan bakau bertambah rusak akibat pembukaan lahan budi daya pertanian dan perikanan, pengembangan permukiman, pembangunan infrastrutkur, pengembangan kota, abrasi dan sedimentasi.

Dijelaskan, kerusakan hutan bakau di pantai timur Jambi sangat cepat dalam 24 tahun terakhir. Selama 1982-1993, kerusakan hutan bakau di Jambi mencapai 5.541 ha per tahun. Sedangkan 11 tahun terakhir (1993-2006), kerusakan hutan bakau rata- rata 344 ha per tahun.

"Luas hutan bakau di Jambi tahun 1982 mencapai 65.000 ha, pada 1993 tersisa 4.050 ha. Sebelas tahun kemudian, luas hutan bakau tersebut hanya 251 ha. Bila dihitung selama 24 tahun terakhir, kerusakan 64.749 ha," katanya.

Kepala Sub Direktorat Tata Ruang Departeman Kelautan dan Perikanan, Sapta Putra Ginting mengatakan, kelestarian kawasan konservasi, hutan bakau dan suaka perikanan pesisir pantai di Tanah Air belakangan ini semakin terancam. Kerusakan yang terjadi diperkirakan tidak dapat dipulihkan karena eksploitasi sumber daya alam di kawasan pesisir pantai yang sulit dikendalikan.

Pemanfaatan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air harus dikendalikan agar jangan sampai merusak sumber daya alam dan memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. [141]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP